

Peran Pemerintah Daerah Lombok Barat Terhadap Konflik Sosial Di Desa Mareje

Armita Arvianti¹, Bayu Setiawan², Syamsunasir³, Pujo Widodo⁴

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 23 April 2023

Publish : 04 July 2023

Keywords:

Konflik Desa Mareje

Peran Pemerintah

Info Artikel

Article history:

Diterima : 23 April 2023

Publis : 04 Juli 2023

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik di desa mareje. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Focus Group Discussion (FGD) bersama narasumber melalui aplikasi daring. Hasil penelitian menunjukkan Konflik yang terjadi di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Konflik Sosial bukan Konflik SARA, tidak seperti yang beredar di Media, Pemerintah hadir dalam penanganan konflik di Mareje melalui FORKOPIMDA, FKUB, bersama Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat guna menangani Konflik Sosial yang terjadi dengan membentuk Balai Mediasi. Penanganan Konflik di Mareje mengesampingkan penyelesaian secara Hukum dan diselesaikan melalui pendekatan Adat Istiadat/ Kearifan Lokal Beberapa langkah mitigas dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik lanjutan. Pemerintah mengumpulkan media massa untuk mengklarifikasi konflik yang terjadi bahwa bukan Konflik SARA sehingga mencegah semakin menyebarnya isu ini menjadi isu nasional.

Abstract

This study aimed to determine local governments' role in overcoming conflicts in Majeje village. The research method used is qualitative. The data collection method used is the Focus Group Discussion (FGD) method with resource persons through an online application. The results showed that the conflict that occurred in Mareje Village, Lembar District, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province was a Social Conflict, not a SARA Conflict, unlike what was circulated in the Media, The government is present in handling conflicts in Mareje through FORKOPIMDA, FKUB, together with Traditional Leaders and Community Leaders to deal with Social Conflicts that occur by establishing a Mediation Center. Conflict Handling in Mareje overrides legal resolution and is resolved through a Customs / Local Wisdom approach Some mitigates are taken to prevent further conflicts from occurring. The government gathered mass media to clarify the conflict that occurred that was not the SARA Conflict to prevent the spread of this issue into a national issue.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Armita Arvianti

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email : armita.vianti@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Secara sosial dan budaya, Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan terbuka. Hal ini dicontohkan oleh banyaknya kelompok etnis, keyakinan agama, dan latar belakang ras yang dimiliki orang, yang semuanya berfungsi untuk menghiasi lingkungan sosial yang berbeda-beda (Pratiwi, 2021). Bangsa Indonesia mampu menegaskan eksistensinya di kancah global karena keragaman yang bersumber dari perbedaan kualitas yang dimilikinya (Wahab, 2021). Keanekaragaman sosial budaya bangsa merupakan kekuatan sekaligus potensi tanggung jawab, karena di dalamnya terdapat sejumlah kelemahan yang dapat menimbulkan konflik yang dapat merusak integrasi negara secara keseluruhan (Mukhtar & Jannah, 2018).

Tingkah laku dan tindakan seseorang yang bertentangan dengan orang lain seringkali dipicu oleh konflik sebagai pelepasan emosi terpendam yang telah menumpuk di dalam diri mereka. Bahkan di antara orang-orang, keinginan yang kuat untuk maju dapat menimbulkan pertikaian, seperti halnya kebutuhan emosional yang kuat untuk menempatkan tanggung jawab di tempat lain. Isu-isu masyarakat mencerminkan pengalaman dan perspektif yang unik dari para anggotanya (Rahman et al., 2020). Perbedaan pendapat ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan kepribadiannya sendiri, terpapar pada rangkaian

pengalaman tertentu saat lahir, dan mengembangkan rangkaian keyakinan dan norma inti mereka sendiri yang membentuk pandangan dunia mereka dan mendorong mereka untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan cara tertentu (Ali et al., 2019).

Beberapa pergolakan masyarakat akar rumput baru-baru ini muncul sejak dimulainya reformasi. Kehidupan berbangsa dan bernegara tampaknya tidak lagi memiliki prinsip kemanusiaan (Fathoni & Wagian, 2018). Itu bisa dimengerti setiap orang dan segala sesuatu di negara ini tampaknya bekerja untuk memecah belah bangsa. Lapisan ini mewakili individu sehari-hari yang hidupnya dibentuk oleh tindakan kekerasan dan konflik. Contoh-contoh dari Aceh hingga Papua menyoroti pertikaian kekerasan yang meletus di tempat-tempat itu. Perjuangan kekerasan Kalimantan antara Dayak dan Madura adalah salah satu contohnya (Baihaqi, 2020).

Konflik antar masyarakat di suatu wilayah dapat terjadi akibat perbedaan pandangan atau kepentingan, perbedaan budaya, adat istiadat, atau latar belakang sosial ekonomi yang berbeda (Iswanto, 2022). Konflik antar masyarakat dapat mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban, kerugian materiil, serta dampak psikologis yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya penyelesaian konflik yang tepat dan mengedepankan dialog, partisipasi aktif masyarakat, serta penegakan hukum yang adil dan objektif (Zuhdi, 2019). Selain itu, pemerintah dan stakeholder lainnya juga dapat berperan dalam memberikan dukungan dan fasilitasi untuk penyelesaian konflik tersebut (Hidayatul Juma'ah et al., 2017).

Konflik yang terjadi di Desa Mareje Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Dimana narasi yang beredar luas, bahwa konflik tersebut merupakan aksi bela agama dan melibatkan organisasi local. Keributan bermula ketika warga Dusun Bengket Lauk melakukan aksi unjuk rasa melalui Dusun Ganjar, Desa Mareje, sebagai bagian dari perayaan takbiran. Kemudian, seorang pemuda dari rombongan arak-arakan itu menyalakan petasan keras di samping kandang sapi milik warga Dusun Ganjar. Alhasil, pemilik sapi pun menegur pemuda tersebut, namun dari perbincangan tersebut terjadilah kesalahpahaman yang membuat pemilik sapi dipukul oleh rombongan pawai Dusun Bengket Laut. Bhabinkamtibmas dan polisi berhasil menyekat malam takbiran untuk mencegah kekerasan lebih lanjut. Tahun berikutnya, pada tanggal 2 Mei 2022, terjadi keributan lagi ketika anak-anak muda dari Dusun Ganjar dan Dusun Bangket Lauk berpapasan dalam perjalanan menuju hajatan. Penyerangan malam hari di Dusun Ganjar oleh penduduk setempat merupakan puncak konflik. Enam rumah di kantor administrasi Lembaga Pengembangan Keagamaan Budha (LPKB) di Dusun Ganjar rusak atau musnah dilalap api.

Penelitian (Winengan, 2019) menjelaskan bahwa motif konflik intoleransi pada masyarakat Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya ekonomi masyarakat, masalah asmara, kurang sosialisasi untuk bertoleransi, dan konsumsi minuman yang memabukan khususnya para remaja. Selain itu peran pemerintah daerah belum maksimal sehingga mampu menekan berkurangnya konflik intoleransi. Selanjutnya dalam penelitian (Ichsan et al., 2021) mendeskripsikan fungsi pemerintah kota dalam menengahi dan menyelesaikan perselisihan antar warga. Pemerintah daerah terutama menggunakan mediasi sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan. Adanya *Joint Standing Procedure* untuk menangani konflik sosial dan identifikasi daerah rawan konflik merupakan dua faktor yang memberikan kepercayaan terhadap peran pemerintah daerah. Dukungan anggaran dan jumlah polisi yang sangat sedikit menjadi faktor pembatas bagi fungsi pemerintah daerah (Mutalib & Ilmam, 2021).

Konflik yang terjadi di Desa Mareje didasarkan pada perbedaan pendapat kesalahpahaman, adanya pihak yang dirugikan dan perasaan yang sensitif. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini penting dilakukan untuk menciptakan kondisi harmonis yang aman, damai, dan sejahtera di masyarakat Desa Mareje Nusa Tenggara Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan TA. 2023.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik studi kualitatif digunakan. Fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap, kepercayaan, dan persepsi yang dialami oleh seseorang atau kelompok diberi penjelasan dan analisis melalui metode kualitatif ini. Objek dari penelitian ini adalah kasus yang terjadi di Desa Mareje, yaitu konflik antar dusun yang berakhir dengan pembakaran rumah di salah satu dusun. Permasalahan penelitian yang dikaji adalah Pemerintah Daerah Lombok Barat dengan sampel dari narasumber yang berkompeten yaitu dari Polda NTB dan Kesbangpol Lombok Barat.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *Focus Group Discussion* (FGD) bersama narasumber melalui aplikasi daring. FGD ini, di bawah bimbingan moderator, bertujuan untuk menggali lebih dalam aspek-aspek tertentu dari materi yang dibahas. Pengumpulan data pada penelitian ini berasal dari paparan materi narasumber serta menggunakan teknik wawancara dengan narasumber Dir Intelkam Polda NTB, Kombes Pol. Hendro Kusumayadi, SIK., M.H dan Kepala Bakesbangpol Lombok Barat, Mahnan, S.STP., M.H. Serta studi Pustaka dan triangulasi dengan mengecek keabsahan data atau informasi dengan membandingkannya dengan sumber lainnya. Setelah melakukan FGD, data yang dikumpulkan harus dianalisis agar dapat diambil kesimpulan atau rekomendasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Metode analisis data hasil FGD yaitu transkripsi, koding, kategorisasi, dan analisis tematik.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konflik di Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, melibatkan antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan pembakaran rumah seorang warga. Hal ini sebagai buntut atas kesalahpahaman antar pemuda di Dusun Bangket Laut dengan Warga Dusun Pelan di Desa Mareje akibat suara petasan pada malam takbiran.



Gambar 1. Sisa Kebakaran Rumah Warga Akibat Konflik Antar Pemuda di Desa Mareje

Sumber: liputan6.com

Peristiwa ini diisukan sebagai Konflik SARA, akan tetapi telah dijelaskan bahwa konflik tersebut merupakan murni konflik sosial yang tidak sengaja pihak yang terkait berbeda keyakinan/agama yaitu agama Hindu sehingga isu yang muncul di media adalah konflik SARA. Proses pendamaian antar kelompok ini melibatkan berbagai pihak diantaranya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tokoh Masyarakat dan Tokoh adat, bersama-sama menangani konflik dan mewujudkan kesepakatan damai antar masyarakat yang berkonflik sehingga terwujudnya kedamaian. Pemerintah Daerah Lombok Barat telah membentuk Balai Mediasi dalam menyelesaikan berbagai konflik. Balai Mediasi ini cukup efektif dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi yang membutuhkan tindakan cepat. Namun untuk permasalahan di Desa Mareje diselesaikan dengan kerjasama berbagai pihak termasuk Balai Mediasi ini, FKUB Lombok Barat, serta Pemerintah Daerah bersama dengan FORKOPIMDA. Dalam penyelesaiannya, Pemerintah beserta pihak berwenang bersama-sama menyepakati untuk menyelesaikan persoalan dengan

mengesampingkan hukum pidana dan mengedepankan pendekatan penyelesaian melalui kearifan lokal yaitu dengan adat istiadat agar percepatan masalah segera terselesaikan.

Masyarakat Lombok memiliki adat istiadat serta budaya yang tak jauh dari adat istiadat Bali, dimana Pura tidaklah sulit ditemukan di Lombok walaupun mayoritas Suku Sasak beragama muslim serta terkenal dengan Tanah Seribu Masjid, yang pada faktanya mencapai 4000 masjid. Namun, Lombok pernah diwacanakan untuk diadakan pembangunan pura terbesar di Asia namun hal tersebut mendapat penolakan oleh mayoritas penduduk, hal ini dikarenakan adanya politik identitas di masyarakat Lombok yang masing-masing menonjolkan identitas. Oleh karena itu, agar tidak terjadi konflik berkelanjutan, untuk sementara ada beberapa langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya konflik lanjutan, diantaranya dengan menunda izin kegiatan pawai ogoh-ogoh yang akan dilakukan oleh umat hindu yang rute pawaihnya melewati mayoritas pemukiman warga yang beragama muslim. Penundaan izin ini dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya potensi konflik yang akan terjadi apabila kegiatan ini dilaksanakan. Mungkin pemerintah akan memberikan izin kepada umat Hindu untuk melakukan kegiatan pawai ogoh-ogoh ini namun hanya sebatas di lingkungan yang mayoritas beragama Hindu.

Dalam menghindari konflik yang terjadi dimasyarakat pemerintah sentantiasi melakukan pencegahan dengan cara pendekatan social kultur yang berada di NTB berupa *event* kesenian dan adat istiadat, selain dapat mempererat hubungan keanekaragaman masyarakat lombok, juga dapat menjadi income apabila wisatawan datang berkunjung pada event tersebut. selain itu pendekatan sosial kultur tidak sulit dilakukan karena mayoritas penduduk masyarakat NTB taat beragama dan memegang teguh kepercayaan masing-masing. Beberapa upaya Polda NTB pasca kejadian konflik social yang dialami yaitu mencari sumber permasalahan agar upaya pencegahan kejadian serupa dapat diatasi, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan mengumpulkan masyarakat lalu mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi kejadian yang serupa, memberikan maklumat kepada masyarakat untuk tidak anarkis atau bertindak semena-mena lagi dan disertai dengan tindakan hukum bagi yang melanggar aturan tersebut, dan melakukan patroli rutin dan mendirikan posko pengamanan untuk daerah yang rawan terjadi konflik.

Pada umumnya masyarakat NTB patuh, psatuh, dan patju, namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat sehingga dapat bertindak diluar kendali. Salah satu faktornya yaitu faktor ekonomi, orang yang memiliki ekonomi stabil cenderung tidak tempramental dibandingkan dengan orang dengan ekonomi pas-pasan. Selain itu, kecemburuan sosial juga tak dapat dihindarkan menjadi pemicu konflik, seperti adanya kesenjangan di Desa Mareje dimana Pura berdiri dengan indah sedangkan Masjid banyak yang membutuhkan renovasi atau perbaikan.

Pemerintah telah melaksanakan rapat koordinasi beserta jajaran dan membentuk satgas dalam penanganan konflik tersebut, membangun kembali rumah korban yang dibakar, melakukan Gawe Rapah atau syukuran bersama segenap masyarakat dan pemerintah kabupaten beserta tokoh adat dan FORKOPIMDA lainnya. Beberapa kesepakatan damai yang telah dilakukan oleh Satgas Penanganan Konflik yaitu menjamin bahwa masyarakat yang terdampak dalam kejadian ini dapat kembali beraktifitas seperti biasa dengan perasaan aman, rumah yang rusak akibat kejadian ini diperbaiki oleh pemerintah daerah agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan melakukan rekonsiliasi secara berulang untuk memastikan bahwa masalah ini telah diselesaikan (Azwandi, 2018).

Adapun tantangan terbesar dari penanganan konflik ini adalah pemberitaan melalui berbagai media yang apabila tidak segera di tangani maka akan semakin menyebar menjadi isu nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani media ini seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi bahwa kejadian di Desa Mareje bukan konflik SARA serta berupaya untuk mengumpulkan media lalu menyampaikan informasi resmi secara terbuka dan sesegera mungkin, sebelum didahului oleh media yang dalam memberitakan sesuatu terkadang tidak sesuai.

Pada dasarnya, sebagaimana dibuktikan oleh temuan (Umaruddin, 2021) bahwa suatu potensi konflik sosial harus terlebih dahulu mengendap dalam masyarakat sebelum dapat tumbuh, memanas, menjadi tegang, dan akhirnya berakhir dengan konflik kekerasan yang dipicu oleh peristiwa

di luar. Kata "konflik" dapat menunjukkan berbagai hal yang berbeda. Dari segi bentuk, ada dua jenis konflik: horizontal dan vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang muncul dari pandangan dunia yang berbeda secara fundamental tentang isu-isu seperti politik, keyakinan, ekonomi, dan sifat alam semesta. Separatisme dan terorisme adalah contoh perselisihan vertikal yang muncul antara negara dan masyarakat (Mutolib et al., 2015).

Jika kita ingin berhasil menyelesaikan konflik yang pasti akan muncul sebagai akibat dari ketidaksepakatan ini, kita memerlukan rencana manajemen konflik yang melibatkan pembuatan Strategi Besar untuk Pencegahan dan Manajemen Konflik. Sementara itu, Ichsan Malik berpendapat bahwa strategi pencegahan konflik yang dinamis diperlukan untuk membantu deteksi dini dan respon terhadap konflik. Ada lima bagian utama kerangka kerja dinamis pencegahan konflik: eskalasi dan de-eskalasi, faktor konflik, aktor konflik, pemangku kepentingan, dan kemauan politik pihak berwenang untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian. Hal di atas dikenal sebagai kerangka pencegahan konflik yang dinamis karena mencakup dua hal mendasar: analisis situasi dan kondisi konflik dan pasca konflik, serta asumsi bahwa konflik dapat muncul dari kelima faktor tersebut (Indrawan, 2020).

Penelitian terdahulu tentang peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik terdapat pada penelitian (Riggs et al., 2016) yang menjelaskan komponen pendukung yaitu tindakan preventif. Yang pertama adalah memberikan nasehat dan penyuluhan kepada para pendukung baik sekolah maupun kelompok yang sependapat. Kedua, mendorong ketenangan melalui penggunaan plakat. Ketiga, penggeledahan miras secara serentak di Kabupaten Madiun dilakukan berkali-kali. Selain itu, pihak Polres Madiun melakukan tindakan represif atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, antara lain 1) menangkap pihak yang dianggap sebagai penghasut, 2) membubarkan massa, dan 3) menindak pelanggaran hukum. Beberapa elemen ini juga terkait dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi konflik sosial. Sementara itu dalam penelitian (Nindyatmoko et al., 2022) menjelaskan untuk menghadapi potensi konflik, masyarakat harus tetap tenang, sistem penyelesaian sengketa secara damai harus dikembangkan, jumlah konflik yang dapat timbul harus dikurangi, dan sistem peringatan dini harus dibangun.

4. KESIMPULAN

Konflik yang terjadi di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Konflik Sosial bukan Konflik SARA, tidak seperti yang beredar di Media. Pemerintah hadir dalam penanganan konflik di Mareje melalui FORKOPIMDA, FKUB, bersama Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat guna menangani Konflik Sosial yang terjadi dengan membentuk Balai Mediasi. Penanganan Konflik di Mareje mengesampingkan penyelesaian secara Hukum dan diselesaikan melalui pendekatan Adat Istiadat/ Kearifan Lokal. Beberapa langkah mitigas dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik lanjutan. Pemerintah mengumpulkan media massa untuk mengklarifikasi konflik yang terjadi bahwa bukan Konflik SARA sehingga mencegah semakin menyebarnya isu ini menjadi isu nasional.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Asidah, E., & Husmiati, H. (2019). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat). *JiAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 153. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i2.1273>
- Azwandi, A. (2018). Konflik Dan Resolusi Konflik Jama'ah Masjid Kembar Menara Tunggal Di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Lombok Barat. *JURNAL SCHEMATA : Pascasarjana UIN Mataram*, 7(1), 34–60. <https://doi.org/10.20414/schemata.v7i1.299>
- Baihaqi, M. (2020). Pengaruh Kontestasi Politik Desa Terhadap Konflik Ahmadiyah Di Gegerung-Lombok Barat. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 19(1).
- Fathoni, M. Y., & Wagian, D. (2018). Peran BPN Lombok Barat dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Masyarakat Dengan Investor di Atas Tanah yang Terindikasi Terlantar. *Jurnal Jatiswara*, 33(2). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i2.163>

- Hidayatul Juma'ah, S., Sulaksono, T., & Sarofah, R. (2017). Pengaruh Konflik Nahdlatul Wathan Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Lombok Timur. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3). <https://doi.org/10.18196/jgpp.4386>
- Ichsan, A. C., Anwar, H., Aji, I. M. L., Webliana, K., Waru, T., Febryano, I. G., & Salampessy, M. L. (2021). Land Use Conflict Mapping in Mount Rinjani National Park Pesangrahan Village East Lombok District. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 891(1), 012029. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/891/1/012029>
- Indrawan, J. (2020). Kearifan Lokal Suku Sasak Dan Suku Bali di Lombok Sebagai Upaya Rekonsiliasi Konflik. *Journal of International Relations*, 12(33).
- Iswanto, D. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Bentuk Percepatan Pelayanan Publik di Kecamatan Lembar Lombok Barat. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(1).
- Mukhtar, M., & Jannah, W. (2018). Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal ; Studi Kasus Di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 2(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v2i1.612>
- Mutalib, A., & Ilmam, M. A. Z. (2021). Konflik Pemekaran Dusun di Desa Anjani. *Jurnal Sikap*, 6(2).
- Mutolib, A., Ismono, H., & Manis, J. L. (2015). Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat). *JURNAL Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan*, 12(3).
- Nindyatmoko, A., Setyowati, K., & Haryanti, R. H. (2022). Collaboration after Conflict: A Lesson from Collaborative Action in Customary Land Tenure Conflicts in Lombok, Indonesia. *Forest and Society*, 6(1), 294–310. <https://doi.org/10.24259/fs.v6i1.14005>
- Pratiwi, R. (2021). The Role of Religious Leaders in Indonesia's Multicultural Society in Preventing Conflict. *Journal of Islamic Education*, 5(2).
- Rahman, M. F., Asikin, Z., & Sahnan. (2020). Pola Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antar Desa Pasca Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL) Tahun 2019 Di Kabupaten Lombok Timur. 8(2).
- Riggs, R. A., Sayer, J., Margules, C., Boedhihartono, A. K., Langston, J. D., & Sutanto, H. (2016). Forest tenure and conflict in Indonesia: Contested rights in Rempek Village, Lombok. *Land Use Policy*, 57, 241–249. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.06.002>
- Umaruddin, D. (2021). Konflik Agraria Di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat 1979–2019. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 3(2), 141. <https://doi.org/10.24843/JIWSP.2021.v03.i02.p06>
- Wahab, A. J. (2021). Resolusi Konflik Struktural Dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang Kalbar. *Harmoni*, 20(2), 188–208. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.506>
- Winengan, W. (2019). Local community resistance in Lombok against tourism development policy. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 32(1), 69. <https://doi.org/10.20473/mkp.V32i12019.69-79>
- Zuhdi, M. H. (2019). Local Wisdom of Sasaknese Society as A Model of Conflict Resolution. *Proceeding Book 7th Asian Academic Society International Conference 2019*, 1(1).